



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023**

Penyampaian ringkasan LPPD ini sekaligus untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2023 ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang ke depan.

1. Capaian Kinerja Makro

**Tabel
Capaian Kinerja Makro**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERUBAHAN %
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,74	72,35	0,85
2	Angka Kemiskinan	8,44	7,87	-6,754
3	Angka Pengangguran	9,87	8,95	-9,321
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,31	5,4	-14,422
5	Pendapatan Per Kapita	107,455	115,169	7,179
6	Ketimpangan Pendapatan	0,35	0,389	11,143

Sumber : Karawang Dalam Angka. BPS Kabupaten Karawang 2023.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketenteraman dan ketertiban. Adapun rincian capaian program dan kegiatan diuraikan pada tabel di bawah ini.



a. Urusan Pendidikan

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan Pendidikan Tahun 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai berikut :



Hasil Capaian Bidang Pendidikan Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										Indeks Pencapaian SPM
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					
		Indikator	Target	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Capaian	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	92.630	61.114	65,98%	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	100%	100%	52,37%	52,37%	64,25%
							Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	100%	100%	50,11%	50,11%	
							Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun)	100%	100%	69,53%	69,53%	
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	408.864	395.061	96,62%	Kemampuan Literasi SD	100%	100%	51,81%	51,81%	89,66%
							Kemampuan Literasi SMP	100%	100%	61,70%	61,70%	
							Kemampuan Numerasi SD	100%	100%	40,02%	40,02%	
							Kemampuan Numerasi SMP	100%	100%	53,40%	53,40%	
							Iklm Keamanan SD	100%	100%	68,40%	68,40%	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya		51,73%	Iklm Keamanan SMP	100%	100%	65,51%	65,51%		
		Iklm Kebhinekaan SD	100%	100%	66,97%	66,97%						
		Iklm Kebinekaan SMP	100%	100%	65,54%	65,54%						
		Iklm Inklusivitas SD	100%	100%	55,41%	55,41%						
Iklm Inklusivitas SMP	100%	100%	54,73%	54,73%								



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

		Nasional				Angka Partisipasi Sekolah (7-15 Tahun)	100%	100%	96,62%	96,62%
--	--	----------	--	--	--	--	------	------	--------	--------

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Capaian										Indeks Pencapaian SPM
		Penerima Layanan Dasar (Bobot Nilai 80%)					Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot Nilai 20%)					
		Indikator	Target	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Capaian	Indikator	Target	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi	Capaian	
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	34.570	13.231	38,27%	Kemampuan Literasi SD Kesetaraan	100%	100%	45,21%	45,21%	39,11%
							Kemampuan Literasi SMP Kesetaraan	100%	100%	45,89%	45,89%	
							Kemampuan Literasi SMA Kesetaraan	100%	100%	45,50%	45,50%	
							Kemampuan Numerasi SD Kesetaraan	100%	100%	32,33%	32,33%	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya			43,17%	Kemampuan Numerasi SMP Kesetaraan	100%	100%	46,86%	46,86%	
				Kemampuan Numerasi SMA Kesetaraan	100%		100%	43,23%	43,23%			



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

		berdasarkan hasil Asesmen Nasional				Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	100%	100%	38,27%	38,27%	
	Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Secara Keseluruhan										64,34%

**b. Urusan Kesehatan**

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan kesehatan Tahun 2023, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi		Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	<u>36.263</u> 41.361	X 100%	87,67
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100	<u>36.215</u> 39.481	X 100%	91,73
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	<u>36.124</u> 37.601	X 100%	96,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	<u>160.090</u> 179.114	X 100%	89,38
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	<u>320.560</u> 329.863	X 100%	97,18
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	<u>948.578</u> 1.567.522	X 100%	60,51
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	<u>200.773</u> 266.034	X 100%	75,47
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan	100	<u>129.695</u> 155.366	X 100%	83,48



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi		Capaian (%)
		kesehatan sesuai standar				
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	<u>34.467</u> 36.926	X 100%	93,34
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	<u>2.717</u> 3.335	X 100%	81,47
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	<u>36.191</u> 39.123	X 100%	92,51
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	<u>40.815</u> 46.107	X 100%	88,52



c. Urusan Pekerjaan Umum

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan pekerjaan umum Tahun 2023, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang sebagai berikut :

AIR MINUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM jaringan perpipaan : - Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan - Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan - Perluasan SPAM - jaringan perpipaan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga	Formula : a. Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM (sebanyak 577.290 rumah) b. Jumlah total rumah tangga diseluruh kabupaten /kota (sebanyak 772.870 rumah tangga)	$577.290 \times 100\% = 772.870 = 74,69\%$
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : - Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan - Peningkatan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.	Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap	a. Jumlah Rumah Tangga yang dipenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : - Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan - Peningkatan SPAM	$1.480.830 \times 100\% = 1.588.149 = 93,24\%$



<p>SPAM Bukan Jaringan Perpipaan</p> <p>- Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan</p>		<p>mata air. Kuantitas kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 liter/orang /hari untuk kabupaten/ kota yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orng/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut.</p> <p>-Kaulitas: Fisik Kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau. Parameter tersebut disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas. Dalam Rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.</p>	<p>Bukan Jaringan Perpipaan</p> <p>- Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.</p> <p>Sebanyak 1.480.830 Rumah Tangga.</p> <p>b. Jumlah total rumah tangga diseluruh kabupaten / kota (sebanyak 1.588.149 rumah tangga)</p>	
---	--	--	--	--



PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Capaian
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	<p>1. Kuantitas :Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.</p> <p>2. Kualitas Pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari: 25 jiwa/Ha</p> <p>3. Kualitas : Pelayanan SPALD-S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dari wilayah perkotaan</p> <p>4. Kualitas : pelayanan SPALD-T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih</p>	<p>Akses dasar : Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha.</p> <p>Akses aman : Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan</p> <p>Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik</p>	<p>Perhitungan Capaian</p> <p>A = Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik</p> <p>B = Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar</p> <p>Capaian SPM Pelayanan SPALD-S Akese Dasar : $a/b \times 100\%$</p> <p>Perhitungan capaian :</p> <p>a = Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT</p> <p>b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar. Capaian SPM Akses Aman = $a/b \times 100\%$</p> <p>Perhitungan capaian :</p> <p>a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p>b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM Pelayanan SPALD-T</p>	<p>$\frac{1.149.780}{1.426.260} \times 100\%$</p> <p>= 80,62%</p> <p>$\frac{39.508}{233.228} \times 100\%$</p> <p>= 16,94%</p> <p>$\frac{665.472}{701.531} \times 100\%$</p> <p>= 94,86%</p>



		besar 25 /Ha dan wilayah perkotaan		akses aman $= a/b \times 100\%$	
		5. Pelayanan dasar air limbah domestic			

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui SPAM Jaringan perpipaan adalah berdasarkan capaian pelayanan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM (sebanyak 577.290 rumah tangga) dan Jumlah Total Rumah Tangga diseluruh Kabupaten Karawang sebanyak 772.870 Rumah Tangga sehingga total yang terlayani adalah sebesar 74,69%.
- 2) Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan adalah dihitung berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih Non Perpipaan yang terdiri dari Program Pamsimas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yang bersumber dari APBD II maupun APBN dengan Total Rumah Tangga sampai akhir pelayanan SPM Tahun 2023 adalah sebanyak 1.480.830 Rumah Tangga dan Jumlah Total Rumah Tangga diseluruh Kabupaten Karawang sebanyak 1.588.149 Rumah Tangga (sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2019) sehingga



total yang terlayani adalah sebesar 93,24%.

- 3) Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Akhir Tahun Pelayanan SPM tahun 2023 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	CAPAIAN
1.	Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk atau Tanki Septik	-
2.	Jumlah Rumah Yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	217 Rumah
3.	Jumlah Rumah Yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Lumpur Tinja	217 Rumah
4.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 Lokasi
5.	Kendaraan Pengangkutan Lumpur Tinja	2 Unit



d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2023, di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang sebagai berikut :

**REALISASI PENCAPAIAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2023**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Karawang	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh umah Layak Huni	100%	$\frac{104}{104} \times 100 \%$	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	$\frac{0}{0} \times 100 \%$	0%

Realisasi Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100 % (Seratus Persen) dari kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang pada anggaran tahun 2023 telah terealisasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana beserta PSU di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 10.463.194.400 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan output kegiatan 104 Unit beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas pendukung.



Sampai dengan Tahun 2023 sudah terbangun rumah layak huni bagi korban abrasi pantai Cemarajaya yaitu sebanyak 266 unit dari rencana sebanyak 299 unit yang akan dibangun sebagai hunian baru bagi masyarakat terdampak abrasi pantai Cemarajaya Kecamatan Cibuyaya, sehingga sisa Pembangunan ruluhi bagi korban bencana abrasi Pantai di Cemarajaya yaitu sebanyak 33 unit. Relokasi korban bencana abrasi pantai Cemarajaya di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuyaya yang sudah terjadi sejak Tahun 2016, sesuai dengan Surat Laporan Abrasi Air Laut Pasang dari Kepala Desa Cemarajaya dengan Nomor Surat : 366/73/Ds, tanggal 29 Juli 2016 bahwa telah terjadi abrasi yang melanda Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2016 pukul 05:00 WIB yang menyebabkan sebanyak 371 rumah rusak berat dan infrastruktur jalan rusak. Berdasarkan kejadian tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pematangan lahan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk relokasi korban bencana di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuyaya dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tersedia lahan dengan luas 3 Ha dari rencana sebesar 7 Ha. Pada Tahun 2023, telah dilanjutkan kembali pembangunan perumahan bagi korban abrasi pantai tersebut.

2. Untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian SPM untuk tahun anggaran 2023 adalah 0% (Nol Persen). Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang pada tahun 2023 belum secara khusus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.



e. Urusan Sosial

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan sosial Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut :

Capaian Bidang Sosial Tahun 2023

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		CAPAIAN	
			VOLUME	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial			2.432.097.650		1.961.565.550
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			2.432.097.650		1.961.565.550
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	78.562.000	171	78.302.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	30.503.000	90	30.503.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	197	457.214.750	197	453.987.750
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	1.085.112.400	300	987.120.600
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak	Orang	50	27.443.500	4	5.859.000



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2023

	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1500	163.303.800	1.500	11.233.800
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	140	512.895.400	140	348.869.800
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	170	77.062.800	126	45.689.600
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota			403.903.100		358.395.300
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			403.903.100		358.395.300
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	321.753.100	0	279.949.300
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	82.150.000	0	78.446.000



f. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Berikut merupakan hasil capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Karawang tahun 2023 :

❖ Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2023, di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang sebagai berikut :

Hasil Capaian Satpol PP Kab. Karawang berdasarkan Permendagri 59/2021

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	308	308	100%	223	223	100%	100%	Sangat Tinggi

❖ Sub Urusan Bencana Daerah

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan bencana daerah Tahun 2023, di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :



**Realisasi Pencapaian Bidang Penanggulangan Bencana
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Penduduk di daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	$\frac{\text{Kemajuan Pekerjaan Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Satu Dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	$\frac{\text{Kemajuan Pekerjaan Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Satu Dokumen RPB Lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	$\frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon Kurang dari 24jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah Seluruh Penetapan Status KLB}} \times 100\%$	0%

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 yang masuk ke dalam 3 (tiga) Kegiatan yang tertuang dalam 11 (sebelas) Sub-Kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut :



**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam
Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Program Penanggulangan Bencana					
A	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</i>				
1	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	300 orang	650 Orang	99.90 %
B	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>				
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	130 Orang	100 %
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu	1 Paket	1 Paket	99,71 %



	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas			
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 Orang	40 Orang	100 %
5	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	200 Orang	94,78 %
C	<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	1 TA	1 TA	99,71 %
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27 Jenis	27 Jenis	97,67 %
D	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>				
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian	1 Dokumen	1 Dokumen	97,54



		Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			
--	--	--	--	--	--

❖ Sub Urusan Kebakaran

Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Tahun 2023, di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :

**Tabel
Realisasi Pencapaian Sub Urusan Kebakaran Daerah
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD
Tahun 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	100 %	$\frac{459}{459} \times 100\%$	100 %
		Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran			
		Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi			
		Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran			
		Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran			
2	Layanan	Layanan		0	



	Pemadaman relawan kebakaran kebakaran (balakar, satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pimpinan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	100 %	0 x100%	0%
		Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran			
		Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi			
		Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran			
		Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran			
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %	$\frac{587}{6587} \times 100\%$	100%

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada BPBD Kabupaten Karawang

Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 yang masuk ke dalam 6 (enam) Kegiatan yang tertuang dalam 1 (satu) Program Kegiatan Urusan Wajib ditunjukkan pada tabel berikut :

**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN %
A	Program Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman Kebakaran	1 TA	1 TA	99,99 %
2.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,98 %
3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		1 Kegiatan	1 Kegiatan	98,76%
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,52%
5	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		1 Kegiatan	1 Kegiatan	99,12 %

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya**a) Hasil EPPD**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.



Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut, Hasil EPPD Kabupaten Karawang pada LPPD tahun 2022 mendapati skor 3,0701 dengan kategori sedang. Dengan mendapati nilai tersebut, maka Kabupaten Karawang menduduki peringkat 127 dari total 414 Kabupaten se Indonesia. Jika dibandingkan dengan hasil laporan LPPD tahun 2021, Kabupaten Karawang hanya mendapati skor 2,42 dan berada pada peringkat 194 dari 400 Kabupaten se Indonesia.

b) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang masih belum ada, karena masih dalam tahap penilaian.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Capaian Target (%) 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Terhadap Target Akhir RPJMD
1	2	3	5	6	7	8
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien	Opini BPK Terhadap laporan Keuangan Daerah	WTP	Na	- %	WTP	-

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp5.196.315.407.230,91 atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp5.206.132.766.413,00 tersebar pada 13 SKPD dan 1 SKPKD yang mengelola pendapatan dari 60 SKPD yang ada di Kabupaten Karawang.

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA per SKPD**

SKPD	PENDAPATAN		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Kesehatan	276.827.664.900,00	293.230.363.748,91	105,93
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.736.946.400,00	3.101.941.262,00	83,01
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	258.120.000,00	94.990.000,00	36,80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	500.000.000,00	585.127.500,00	117,03
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.001.461.480,00	11.965.753.720,00	108,77
Dinas Lingkungan Hidup	13.700.000.000,00	13.589.785.520,00	99,20
Dinas Perhubungan	6.363.238.000,00	4.117.115.900,00	64,70
Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.239.340.456,00	27.065.604.381,00	86,64
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	500.000.000,00	294.738.000,00	58,95
Dinas Perikanan	1.020.000.000,00	627.874.256,00	61,56
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	567.170.000,00	564.929.400,00	99,60
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.335.149.936,00	5.747.312.200,00	68,95
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	3.564.470.709.400,00	3.478.383.515.831,00	97,58
Badan Pendapatan Daerah	1.287.612.965.841,00	1.356.946.355.512,00	105,38
Jumlah	5.206.132.766.413,00	5.196.315.407.230,91	99,81

Untuk Belanja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga terdapat 60 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karawang jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp5.806.716.600.179,00 dan terealisasi sebesar Rp5.203.612.344.737,00 atau 89,61%. Rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD

No	NAMA SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.534.911.407.765,00	1.343.918.979.482,00	87,56
2	Dinas Kesehatan	1.157.866.574.756,00	946.569.311.891,00	81,75
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	764.028.437.985,00	744.283.936.561,00	97,42
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	218.224.050.615,00	207.801.928.512,00	95,22
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.509.671.500,00	62.604.609.577,00	97,05
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan	44.801.379.437,00	42.066.232.993,00	93,89



No	NAMA SKPD	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Linmas			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.827.724.200,00	21.381.447.539,00	89,73
8	Dinas Sosial	33.721.830.619,00	28.924.193.451,00	85,77
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.600.262.550,00	23.296.664.541,00	87,58
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.056.759.300,00	8.464.050.445,00	84,16
11	Dinas Lingkungan Hidup	83.269.942.700,00	77.551.612.502,00	93,13
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.011.550.320,00	20.458.779.714,00	81,80
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.697.416.650,00	20.284.687.339,00	89,37
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	41.583.565.782,00	39.485.328.358,00	94,95
15	Dinas Perhubungan	43.474.980.460,00	41.825.534.393,00	96,21
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.522.874.211,00	16.250.945.635,00	79,18
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.331.547.999,00	15.645.530.563,00	90,27
18	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.982.547.058,00	11.579.672.994,00	82,82
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.611.843.750,00	17.097.055.743,00	87,18
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.128.085.300,00	10.051.785.946,00	90,33
21	Dinas Perikanan	23.953.056.700,00	20.117.327.764,00	83,99
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.700.436.537,00	82.995.919.274,00	83,25
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.435.421.870,00	19.097.515.238,00	89,09
24	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	200.831.205.446,00	187.834.059.689,00	93,53
25	Sekretariat DPRD	138.708.769.980,00	113.613.092.607,00	81,91
26	Kecamatan	154.363.758.509,00	130.321.710.847,00	84,43
27	Inspektorat	24.916.508.800,00	21.807.679.715,00	87,52
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.582.306.300,00	19.104.137.292,00	84,60
39	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	750.062.890.510,00	731.129.615.063,00	97,48
30	Badan Pendapatan Daerah	166.715.736.635,00	156.878.618.477,00	94,10
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	26.284.055.935,00	21.170.380.592,00	80,54
	REALISASI	5.806.716.600.179,00	5.203.612.344.737,00	89,61

5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

a.) Realisasi penerimaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp4.720.362.484.756,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.683.176.350.564,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp11.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan penerimaan pada APBD tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp52.057.432.197,00 atau 1,12 persen.



Berikut Tabel Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 sebagai berikut :

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 2023

NO	URAIAN	PERDA APBD MURNI TA 2022	KU-APBD DAN PPAS TA 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	4.668.305.052.559	4.720.362.484.756	52.057.432.197	1,12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.527.068.645.112	1.683.176.350.564	156.107.705.452	10,22
4.1.01	Pajak Daerah	1.143.597.671.000	1.257.957.438.100	114.359.767.100	10,00
4.1.02	Retribusi Daerah	64.139.684.936	77.764.450.530	13.624.765.594	21,24
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.536.491.978	10.236.048.900	4.699.556.922	84,88
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.794.797.198	337.218.413.034	23.423.615.836	7,46
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.125.436.407.447	3.026.186.134.192	(99.250.273.255)	(3,18)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.638.782.142.035	2.539.531.868.780	(99.250.273.255)	(3,76)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.282.838.751.035	2.183.588.477.780	(99.250.273.255)	(4,35)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	355.943.391.000	355.943.391.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	486.654.265.412	486.654.265.412	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	486.654.265.412	486.654.265.412	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.800.000.000	11.000.000.000	(4.800.000.000)	(30,38)
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.800.000.000	11.000.000.000	(4.800.000.000)	(30,38)
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.800.000.000	11.000.000.000	(4.800.000.000)	(30,38)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-

**b.) Realisasi Pengeluaran****Rencana Belanja Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	APBD MURNI TA 2022	KU APBD DAN PPAS TA 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
5	BELANJA DAERAH	4.848.989.617.000	5.078.019.178.721	229.029.561.721	4,72
5.1	BELANJA OPERASI	3.402.959.999.386	3.605.182.011.141	202.222.011.755	5,94
5.1.01	Belanja Pegawai	1.695.594.278.667	1.882.753.410.554	187.159.131.887	11,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.476.115.180.831	1.447.509.840.115	(28.605.340.716)	(1,94)
5.1.05	Belanja Hibah	89.940.569.020	169.803.661.472	79.863.092.452	88,80
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	141.309.970.868	105.115.099.000	(36.194.871.868)	(25,61)
5.2	BELANJA MODAL	764.559.127.714	800.457.895.580	35.898.767.866	4,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.612.820.000	12.200.000.000	2.587.180.000	26,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.850.428.575	86.608.011.709	3.757.583.134	4,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	208.143.238.358	285.158.600.992	77.015.362.634	37,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	463.664.428.481	416.010.400.579	(47.654.027.902)	(10,28)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	288.212.300	480.882.300	192.670.000	66,85
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	30.000.000.000	(20.000.000.000)	(40,00)
5.3.01	Belanja Tidak terduga	50.000.000.000	30.000.000.000	(20.000.000.000)	(40,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	631.470.489.900	642.379.072.000	10.908.582.100	1,73
5.4.01	Belanja Bagu Hasil	120.773.800.000	134.771.369.000	13.997.569.000	11,59
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	510.696.689.900	507.607.903.000	(3.088.786.900)	(0,60)

Penjelasan tabel diatas yaitu Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 diproyeksikan naik sebesar Rp202.222.011.755,00 atau 5,94 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.605.182.011.141,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai naik Rp187.159.131.887,00 atau 11,04 persendibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesarRp1.882.753.410.554,00;
2. Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp28.605.340.716,00 atau sebesar1,94 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.447.509.840.115,00;
3. Belanja Hibah naik sebesar Rp79.863.092.452,00 atau 88,80 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp169.803.661.472,00;



4. Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp36.194.871.868,00 atau 25,61 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp105.115.099.000,00.

Anggaran Belanja Modal diproyeksikan naik sebesar Rp35.898.767.866,00 atau 4,70 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Modal APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp800.457.895.580,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah naik Rp2.587.180.000,00 atau 26,91 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp12.200.000.000,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin naik Rp3.757.583.134,00 atau 4,54 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp86.608.011.709,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik Rp77.015.362.634,00 atau 37 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp285.158.600.992,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi turun Rp47.654.027.902,00 atau 10,28 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp416.010.400.579,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya naik Rp192.670.000,00 atau 66,85 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2022 menjadi sebesar Rp480.882.300,00.

Anggaran Belanja Tidak Terduga diproyeksikan turun sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 40,00 persen menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni Tahun 2022. Menurunnya alokasi Belanja Tidak Terduga disesuaikan dengan kebutuhan penganggaran seiring dengan asumsi berakhirnya kondisi pandemi *Covid-19* menjadi endemic, sehingga kebutuhan alokasi anggaran untuk belanja tidak terduga diproyeksikan tidak sebesar saat terjadi pandemi pada tahun 2020 dan 2021.

Anggaran Belanja Transfer secara keseluruhan diproyeksikan naik sebesar Rp10.908.782.100,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Transfer pada APBD Murni Tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian penerimaanpendapatan, mengingat ketentuan perundang-undangan yang



menetapkan bahwa besaran Alokasi Dana Desa minimal sebesar 10% dari anggaran danaperimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023, dan Dana BagHasil Pajak dan retribusi kepada pemerintah desa minimal sebesar 10% daranggaran pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun 2023.

c.) Realisasi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	APBD TA 2022 (MURNI)	RANCANGAN APBD TA 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	203.020.084.155,00	0,00	203.020.084.155,00	(100,00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	203.020.084.155,00	0,00	203.020.084.155,00	(100,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.335.519.714,00	0,00	22.335.519.714,00	(100,00)
	Penyertaan Modal Kepada BJB dan Perumdam Tirta Tarum	22.335.519.714,00	0,00	22.335.519.714,00	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	180.684.564.441,00	0,00	180.684.564.441,00	(100,00)

Proyeksi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	APBD TA. 2023	KUA PERUBAHAN APBD TA. 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
6	Pembiayaan Daerah				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	303.550.885.603	600.583.833.766	297.032.948.163	98,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	303.550.885.603	600.583.833.766	297.032.948.163	98,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303.550.885.603	600.583.833.766	297.032.948.163	98,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Kepada Perumdam Tirta Tarum dan BJB	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	303.550.885.603	600.583.833.766	297.032.948.163	98,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	(82.448.144.755)	(82.448.144.755)	100,00



Dari proyeksi pembiayaan di atas, diketahui bahwa pembiayaan Netto pada Perubahan KUA TA 2023 adalah sebesar Rp600.583.833.457,00. Namun demikian, jumlah pembiayaan netto ini belum dapat menutup defisit APBD berjalan, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Perubahan KUA Tahun 2023 masih menyisakan defisit sebesar Rp82.448.144.755,00

6. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 , sebagai berikut :

1. KLIRIN (Klinik Riset dan Inovasi) Kabupaten Karawang;
2. SIMPATIK (Sistem Manajemen Puskesmas Terpadu dan Inisiatif Kolaboratif);
3. SILAHAV (Sistem Laporan Harian Vaksinasi);
4. Pemanfaatan System Teknologi Informatika Dalam Penggunaan Elektronik Medis;
5. SISKAKA (Sistem Informasi Kelola Aset dan Pelacakan Alat Kesehatan);
6. SIMPAN DI-COVID (Sistem Informasi Pemantauan Asesmen Indikator Situasi Covid-19);
7. VIRAL (Visum Rekap Aktivitas Online);
8. RASISTEM WA (Penerapan Aplikasi Sistem WhatsApp) di Puskesmas Adiarsa;
9. CARITA (Catatan Ringkasan Kegiatan Kita) -- Percepatan Pelaporan & Pengawasan;
10. SATIBER (Selaraskan Administrasi Tirtamulya Bersatu);
11. JAPRI (Jamur Krispy) Banyusari;
12. SAPA (Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran);
13. NUSANTARA (Normalisasi Saluran Tambak Rakyat);
14. Pengembangan Kapasitas Petugas Pelayanan Pajak Daerah pada BAPENDA;
15. FAVIS K2 (Form Aktivitas Visum Karawang Kulon);
16. RENAKSI Strategi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kel. Karangpawitan;
17. Laporan Perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berbasis Android;
18. Sistem Antrian Online Sebagai Upaya Peningkatan Ketertiban Pengunjung Puskesmas;
19. E-Survei Kepuasan Pasien;



20. LAKTOBE (Lembar Data Akutual Online Berbasis Elektronik);
21. ASIN PEDANA (Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah);
22. SIMASGAWAI (Sistem Informasi Penggajian Pegawai);
23. DOA PELAYAN SIKOMO (Dokumentasi Hasil Pelayanan dengan Sistem Komputerisasi);
24. Sistem Pelayanan Berbasis Online yang Bersinergi (Si PlayBOY);
25. Cegah Remaja Putri (Rematri) Terhadap Anemia (CERITA);
26. (GEMPITA) Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi Cibuaya;
27. Penataan Arsip Kepegawaian Puskesmas Cilamaya;
28. Sistem Informasi Surat Satu Pintu;
29. GEDODAR (Gerakan Donor Daerah);
30. "SISIMO" (Sistem Informasi Surat Menyurat) Secara Online;
31. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui Survey Kepuasan Masyarakat Online

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada website www.karawangkab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat melalui Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax (0267) 411923

Karawang, Maret 2024

BUPATI KARAWANG


H. AEP SYAEPULOH, SE